

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan

Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam merupakan kantor cabang dari kantor pusat Badan Pengusahaan Batam. Kantor pusat terletak di Batam sedangkan kantor cabang terletak di Jakarta Timur. Dulunya, perusahaan ini bernama Otorita Batam kemudian berubah menjadi Badan Pengusahaan Batam atau biasa disingkat BP Batam. BP Batam adalah lembaga pemerintah pusat yang bertugas dan berwenang mengelola, mengembangkan dan membangun kawasan di Kota Batam, Kepulauan Riau. BP Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2007.



Gambar 2.1 Logo BP Batam
Sumber: bpbatam.go.id

Awalnya Batam hanyalah sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tidak ada kehidupan. Pulau ini ditempati sekitar 6.000 jiwa dengan mata pencaharian sebagai nelayan dan hidup di pesisir pantai. Batam sendiri memiliki letak geografis yang strategis. Berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional tersibuk kedua setelah selat *Dover* di Inggris. Posisi Batam juga strategis yakni 20 km atau 12,5 mil laut dari Singapura. Pulau Batam sendiri merupakan salah satu pulau terbesar dari 329 pulau di sekitar Kepulauan Riau yakni memiliki luas 415 km² atau 67% luas dari Singapura.

Lalu, pada masa orde baru yakni sekitar tahun 1970-an, Presiden Soeharto akhirnya menentukan sebuah gugusan pulau yang termasuk dalam Provinsi Riau saat itu, bernama Batam. Selama pemerintahannya, Presiden Soeharto memang sangat memperhatikan perkembangan pembangunan Batam dari tahap ke tahap.

Walaupun awalnya Presiden Soeharto memprioritaskan pembangunan bidang ekonomi, namun Presiden Soeharto juga tetap memberi perhatian pada bidang industri. Hingga kini telah menjadi sebuah “kota industri” yang mempunyai banyak daya Tarik. Dalam perkembangannya ini, Presiden Soeharto mempercayai beberapa perwakilan untuk menjadi ketua BP Batam.

Pada tahun 1971 – 1976 (Periode Persiapan) pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina dan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi (ESDM), Ibnu Sutowo. Ditunjuk menjadi ketua pertama Otorita Batam. Tahun 1976 – 1978 (Periode Konsolidasi) pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Wakil Ketua Bappanes dan Ketua Opstib, J.B. Sumarlin, diberi tugas oleh Presiden Soeharto untuk menjadi ketua Otorita Batam yang kedua. Tahun 1978 – 1998 (Periode Pembangunan Prasarana dan Penanaman Modal) pada saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, B.J. Habibie. Ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai ketua Otorita Batam yang ketiga. Maret 1998 – Juli 1998 (Periode Lanjutan) adik B.J Habibie yaitu J.E. Habibie menjabat. Walaupun sebentar, ia tetap memiliki prestasi salah satunya perpindahan kantor utama Otorita Batam dari Jakarta ke Batam.

Pada tahun 1998 – 2005 (Periode Pengembangan Prasarana dan Sarana dan Penanaman Modal Lanjutan dengan Perhatian Lebih Besar pada Kesejahteraan Rakyat dan Perbaikan Iklim Investasi) Ismeth Abdullah. Menjabat sebagai ketua Otorita Batam yang ke-lima. Tahun 2005 – 2016 (Periode Pengembangan Batan dengan Penekanan pada Peningkatan Sarana dan Prasarana, Penanaman Modal, serta Kualitas Lingkungan Hidup) Mustofa Widjaja. Menjabat sebagai ketua Otorita Batam yang ke-enam. Pada periode ini, ia berhasil merubah nama Otorita Batam menjadi BP Batam. Tahun 2016 – 2017 (Periode Peningkatan Kinerja Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan Kerja Nyata Menuju Kawasan yang Berdaya Saing Internasional) Hatanto Reksodipoetro. Melanjutkan tongkat estafetnya sebagai ketua BP Batam yang ketujuh.

Tahun 2017 – 2018 (Periode Reformasi dan Peningkatan Kinerja BP Batam, untuk Mewujudkan Pembangunan Batam yang Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia) Lukita Dinarsyah Tuwo. Menjabat sebagai ketua BP Batam yang ke-delapan. Tahun 2019 (Periode Transisi Reformasi dan Peningkatan Kinerja BP Batam, untuk Mewujudkan

Pembangunan Batam yang Maju, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia) Edy Putra Irawady. Menjabat sebagai ketua BP Batam yang ke-sembilan. Tahun 2019 sampai sekarang, BP Batam di ketuai oleh Muhammad Rudi yang juga merupakan Wali Kota Batam.

2.1.1 Visi Misi BP Batam

Badan Pengusahaan Batam memiliki visi memberikan kontribusi bagi peningkatan investasi untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden, Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan misi BP Batam ialah:

1. Mencari investasi asing dalam rangka mendukung struktur ekonomi yang produktif;
2. Memberi dukungan dan fasilitas bagi pengembangan investasi yang berorientasi ekspor dalam rangka menunjang struktur ekonomi yang produktif;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang investasi pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang berkesinambungan;
6. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

2.1.2 Perkembangan Perusahaan

Perkembangan Batam meningkat dengan cepat dari periode ke periode lain. Pada periode Ibnu Sutowo, beliau berhasil menentukan beberapa lokasi yang sudah direncanakan seperti lokasi pembangunan bandara, Pelabuhan laut, pembangunan waduk, dan penyediaan listrik (saat itu untuk Pertamina). Pada periode J.B Sumarlin, pembangunan waduk berhasil di eksekusi, mencatat kendala dari proyek di Batam, dan diputuskannya pembangunan Batam menggunakan APBN dari yang sebelumnya menggunakan anggaran Pertamina. Pada masa kepemimpinan Habibie, beliau membuat Batam berkembang sangat pesat. Habibie menyiapkan pembangunan infrastruktur dengan material unggul,

mengadakan promosi dan kerja sama dengan luar negeri untuk penanaman modal di Pulau Batam, membangun prasarana dan sarana untuk mendukung dan menarik penanam modal untuk berinvestasi. Batam menjadi bukti keberhasilan Pemerintah Orde Baru.

Kemudian pada masa periode J.E. Habibie, beliau berhasil pemberantasan KKN, reformasi tambang pasir laut, wacana pemindahan kantor utama Otorita Batam dari Jakarta ke Batam hingga restrukturisasi organisasi. Periode Ismeth Abdullah, beliau mengedepankan pembangunan fasilitas urban, berupa fasilitas peribatan, olah raga, pemukiman, fasilitas pemerintah, dan fasilitas umum. Di kepemimpinan Mustofa Widjaja, beliau berhasil mendapatkan status kelembagaan Otorita Batam yang jelas dengan terbitnya UU Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, serta peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2011. Dalam hiruk pikuknya perubahan Otorita Batam menjadi BP Batam.

Pada periode Hatanto Reksodipoetro, beliau berhasil melakukan revitalisasi dengan sejumlah sistem yang sebelumnya dilakukan secara manual, ia mengubah seluruh sistem ini menjadi sistem *online* seperti i23J dan KLIK yang menjadi primadona bagi investor. Di periode Lukita Diansyah Tuwo, beliau berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 4,51% melalui berbagai program peningkatan investasi, pariwisata, industri dan ekonomi digital dan lainnya. Pada periode Edy Putra Irawady, beliau memperbaharui sistem perizinan usaha di Batam bagi para investor. Pada tahun 2019 investasi meningkat 53%. Kemudian pada periode Muhammad Rudi, beliau terfokus pada kemudahan perizinan bagi masyarakat maupun investor serta peningkatan investasi di Kota Batam dan beberapa kerja sama dengan perusahaan lain untuk kemajuan Batam.

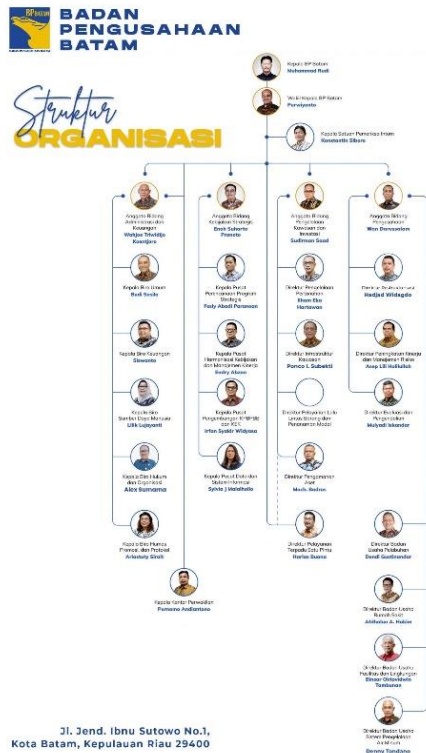
2.1.3 Prestasi Perusahaan

Selama perjalanannya, Badan Pengusahaan Batam meraih beberapa prestasi sebagai berikut:

1. Merdeka Award 2023 kategori Program Penguatan Ekspor Daerah.
2. Indonesian Travel & Tourism Award (ITTA) Foundation sebagai Indonesia Visioner Leader (2023).
3. Anugerah Reksa Bandha (2022) sebagai Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Negara.
4. Terbaik Pertama Kategori Pelayanan Penilaian Dalam Rangka

5. Pengelolaan Barang Milik Negara (2022)
6. Apresiasi Atas Koordinasi Satuan Kerja Selaku Penyerah Piutang (2022)
7. Terbaik Kedua Penatausahaan Barang Milik Negara Terbaik Kelompok Koordinator Wilayah BMN Award (2022)
8. *Stakeholders Award* KPKNL 2022 Kategori Terbaik Kedua Permohonan
9. Lelang Terbaik Kelompok Satuan Kerja / Kementerian Lembaga Khusus Lelang BMN (2022)
10. Kampanye Paling Informatif dalam Gerakan Kampanye Bersama Pelayanan Publik se-Kepulauan Riau Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau
11. Terbaik ke-1 pada kategori Sertifikasi BMN dalam gelaran Penganugerahan BMN Awards 2021 bertajuk "Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Negara" oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
12. Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2021, Terpopuler di Media Cetak dan Bronze Winner Sub Kategori Website dari PR Indonesia (2021)
13. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (ke-5 dan 5 tahun berturut-turut)
14. Badan Publik Informatif Kategori Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS) dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Tahun 2020
15. Juara II Kelompok Kategori Sertifikasi BMN dari Menteri Keuangan RI (2020) dan lainnya.

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kantor Pusat
Sumber: bpb Batam.go.id

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kantor pusat BP Batam berada di Kota Batam itu sendiri. Badan Pengusahaan Batam diketuai oleh seorang Kepala BP Batam yaitu Muhammad Rudi. Bertanggung jawab dalam mengelola Badan Pengusahaan Batam baik segala aspek kegiatan atau project yang sedang atau akan dilaksanakan dan dibantu oleh Wakil Kepala BP Batam yaitu Purwiyanto. Kemudian, beberapa anggota dibawahnya yang bertanggung jawab dalam perumusan, pelaksanaan, ketentuan-ketentuan di bidang kebijakan strategis, pengelolaan kawasan dan investasi, dan yang terpenting mengenai perusahaan Batam. Beberapa anggota tersebut diantaranya Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan yaitu Wahyu Triwidjoko Koentjoro, Anggota Bidang Kebijakan Strategis Enah Suharto Pranoto, Anggota Bidang Pengelolaan dan Kawasan dan Investasi yaitu Sudirman Saad, dan Anggota Bidang Perusahaan yaitu Wan Darussalam. Tugas utama dari BP Batam sendiri adalah melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Batam.

2.2.1 Struktur Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam

Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam merupakan kantor cabang dari BP Batam. Kantor cabang di kontrol oleh salah satu anggota dari BP Batam yaitu Wahjoe Triwidijo Koentjoro selaku Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan. Kantor Perwakilan BP Batam sendiri memiliki Kepala Kantor Perwakilan yaitu Purnomo Andiantono.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kantor Cabang
Sumber: perwakilan.bpbatam.go.id

Gambar diatas merupakan struktur di Kantor Perwakilan BP batam. Kepala Kantor Perwakilan yaitu Purnomo Andiantono bertanggung jawab dalam merumuskan, mengontrol, melaksanakan dan menetapkan program/anggaran, rencana bisnis, peraturan, pedoman dan prosedur dibidang yang menjadi tugas, fungsi dan tanggungjawab di kantor perwakilan BP Batam berdasarkan rencana strategis organisasi serta ketentuan yang berlaku.

Turunan dari kepala kantor ialah Kepala Bagian Umum yaitu Utami Laksmi Dewi dan Kepala Bagian Humas antar Lembaga yaitu Inda Eka Permana. Namun, untuk Kepala Bagian Humas antar Lembaga sudah tergantikan oleh Badrujamal. Untuk Kepala bagian umum bertanggung jawab dalam melaksanakan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi urusan ketatausahaan di bagian umum sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku seperti tugas kedinasan yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

Sementara Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Promosi bertanggung jawab dalam melaksanakan penyusunan, pelayanan dan penyelesaian program dan kegiatan di bidang Hubungan Antar Lembaga dan Promosi sesuai rencana strategis dan ketentuan berlaku, mengurus ketatausahaan di bagian Hubungan Antar Lembaga dan Promosi sesuai prosedur

dan ketentuan yang berlaku.

Turunan dari Kepala bagian Umum terdapat tiga Kepala Sub. bagian Kepala Sub Bagian tata Usaha dan Kepegawaian yaitu Apen Saepudin bertanggung jawab melaksanakan urusan ketatausahaan dan menyiapkan penyusunan konsep program/anggaran, Rencana Bisnis, Rencana Kerja, Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Biaya di subbagian berdasarkan rencana strategis organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Kepala Sub. Bagian Perlengkapan yaitu Yuke Meilani bertanggung jawab melaksanakan persiapan dan penyusunan konsep peraturan, pedoman teknis, petunjuk pelaksana dan standar operasional prosedur di subbagian perlengkapan yang menjadi tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai ketentuan berlaku.

Kepala Sub. Bagian Keuangan yaitu Komarudin bertanggung jawab melaksanakan persiapan dan penyusunan konsep peraturan, pedoman teknis, petunjuk pelaksana dan standar operasional prosedur di subbagian yang menjadi tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai ketentuan berlaku.

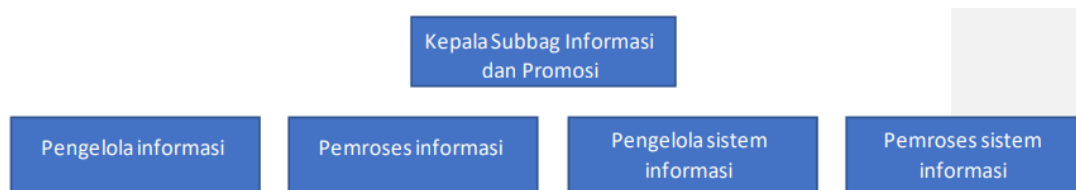
Turunan dari Kepala Bagian Hal dan Promosi terdapat 3 Kepala Sub. Bagian. Kepala Sub. Bagian Hubungan Antar Lembaga yaitu Jaenudin bertanggung jawab melaksanakan persiapan dan penyusunan konsep program/anggaran, Rencana Bisnis, Rencana Kerja, Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Biaya di subbagian berdasarkan rencana strategis organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Sub. Bagian Humas dan Protokol yaitu Siti Rahmalisa bertanggung jawab melaksanakan persiapan dan penyusunan konsep program/anggaran, Rencana Bisnis, Rencana Kerja, Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Biaya di subbagian berdasarkan rencana strategis organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan melaksanakan persiapan dan penyusunan konsep peraturan, pedoman teknis, petunjuk pelaksana dan standar operasional prosedur di subbagian yang menjadi tugas, fungsi dan tanggungjawab sesuai ketentuan berlaku.

Kepala Sub. Bagian Informasi dan Promosi yaitu Elysa Febrianty bertanggung jawab melaksanakan persiapan dan penyusunan konsep program/anggaran, Rencana Bisnis, Rencana Kerja, Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Biaya di subbagian berdasarkan rencana strategis organisasi

sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan melaksanakan urusan ketatausahaan di subbagian sesuai prosedur dan ketentuan berlaku, serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatan, serta alternatif pemecahan permasalahan dari hambatan atau kendala.

2.2.2 Struktur Divisi Informasi dan Promosi



Gambar 2.4 Struktur Organisasi Divisi Informasi dan Promosi

Sumber: Website Internal Kantor

Praktikan ditempatkan dalam divisi Informasi dan Promosi dan struktur isasi yang diperlihatkan dalam gambar tersebut adalah struktur dari divisi informasi dan promosi. Di awali oleh Kepala Sub. Bagian Hubungan Antar Lembaga yaitu Elysa Febrianty bertanggung jawab melaksanakan penyiapan dan penyusunan konsep program/anggaran, Rencana Bisnis, Rencana Kerja, Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Biaya di subbagian berdasarkan rencana strategis organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan melaksanakan urusan ketatausahaan di subbagian sesuai prosedur dan ketentuan berlaku, serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatan, serta alternatif pemecahan permasalahan dari hambatan atau kendala.

Terdapat empat turunan dari Kepala Sub. Bagian Informasi dan Promosi yaitu Pengelola Promosi, Pemroses Promosi, Pengelola Sistem Informasi, dan Pemroses Sistem Informasi. Pengelola Promosi dan Pemroses Informasi memiliki tanggung jawab yang sama yaitu untuk merencanakan kegiatan kunjungan ke instansi terkait untuk identifikasi keabsahan dan penyempurnaan data, menganalisis dan merancang bahan dan data untuk info grafis BP Batam, merancang *layout* dan memutakhirkan data presentasi promosi, menganalisis bahan dan *update* data kebutuhan materi promosi brosur, *leaflet* (Bahasa Inggris, Mandarin, dan Jepang), poster dan *billboard*, menganalisis bahan serta data

advertorial media asing, menganalisis bahan serta data advertorial media asing, menganalisis materi souvenir promosi, mengelola persuratan di subbagian sesuai prosedur dan ketentuan berlaku, menyiapkan dan menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja subbagian, Menyusun identifikasi risiko program kerja yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran organisasi.

Pengelola sistem informasi dan pemroses sistem informasi memiliki tanggung jawab yang sama yaitu merancang konsep program/anggaran, rencana strategis, rencana kerja, kerangka acuan kerja, rincian anggaran biaya, merancang konsep, dan me-review peraturan, pedoman dan prosedur yang akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas terkait data dan informasi, menyelenggarakan pengelolaan alih media sistem informasi, merancang konsep sistem informasi, merancang dan menyiapkan info grafis terkait data dan informasi, membuat petunjuk operasional sistem komputer, melaksanakan pemeliharaan alat pengolah data (*software* dan *hardware*), merancang dan memelihara sistem jaringan komputer, melaksanakan monitoring sistem informasi dan aplikasi jasa pelayanan, membuat konsep dokumen persuratan, menyusun identifikasi risiko program kerja yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan atau sasaran organisasi, menyiapkan dan menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja subbagian, menyusun laporan kemajuan pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tulisan.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Kegiatan umum yang biasanya Kantor Perwakilan Batam lakukan adalah perantara dan penghubung dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Batam dengan membantu melaksanakan Sebagian tugas Badan pengusahaan Batam di Bidang Umum dan Hubungan Antar Lembaga dan Promosi serta tugas-tugas khusus di luar tugas pokok. Biasanya terdapat beberapa tamu dari eksternal yang datang ke Kantor Perwakilan BP Batam untuk mengetahui informasi mengenai Batam atau Badan Pengusahaan Batam. Biasanya eksternal yang menginginkan informasi untuk usahanya yang ingin dibuka di Batam, ekspor

impor yang sedang berlangsung dan lainnya. Selain itu, koordinasi dan menjaga hubungan baik dengan Kementerian/Lembaga dan Non/Kementerian/Lembaga serta mitra kerja lainnya. Di luar ini, kegiatan yang dilakukan oleh bagian umum adalah pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

